HISTORIOGRAFI PKI PADA MASA ORDE BARU: ANALISIS KRITIS NARASI RESMI MELALUI KARYA JOHN ROOSA DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

Fharel Musyaffa Adina[1], Etmi Hardi[2], Rahmuliani Fitriah[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : musofafarel@gmail.com

ABSTRACT

This article critically examines the official New Order historiography of the Indonesian Communist Party (PKI) and the September 30th Movement (G30S) through the lens of John Roosa's Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia. The official narrative, codified by Nugroho Notosusanto and disseminated through textbooks and the propaganda film Pengkhianatan G30S/PKI, framed the PKI as the sole mastermind of the coup and used this framing to legitimize a mass extermination campaign and three decades of authoritarian rule. Employing a historical method of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study compares Roosa's documentary-based reconstruction with the state-sanctioned account. The findings show that Roosa's work, by reconstructing the internal logic of the movement through the Supardjo Document and witness testimonies, exposes the New Order narrative as a deliberately constructed pretext rather than an objective historical record. The study concludes that historiography under authoritarian regimes functions as an instrument of political legitimation, and that post-1998 revisionist scholarship, including Roosa's, is essential for a more evidence-based understanding of the 1965-1966 violence.

Keywords : *Historiography; PKI; New Order; G30S; John Roosa; Official Narrative*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara kritis historiografi resmi Orde Baru mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan 30 September (G30S) melalui karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Narasi resmi yang dibakukan oleh Nugroho Notosusanto dan disebarluaskan melalui buku teks sekolah serta film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI menempatkan PKI sebagai dalang tunggal kudeta, dan narasi ini dijadikan dalih bagi kampanye pembunuhan massal serta legitimasi kekuasaan otoriter selama tiga dekade. Dengan menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini membandingkan rekonstruksi berbasis dokumen yang dilakukan Roosa dengan narasi versi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya Roosa, melalui rekonstruksi logika internal gerakan berdasarkan Dokumen Supardjo dan kesaksian para pelaku, membongkar narasi Orde Baru sebagai konstruksi politik yang sengaja dibangun, bukan catatan sejarah yang objektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa historiografi di bawah rezim otoriter berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik, dan bahwa kajian revisionis pascareformasi 1998, termasuk karya Roosa, penting bagi pemahaman peristiwa kekerasan 1965-1966 yang lebih berbasis bukti.

Kata Kunci : *Historiografi; PKI; Orde Baru; G30S; John Roosa; Narasi Resmi*

PENDAHULUAN

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 merupakan salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Indonesia modern. Penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober 1965 menjadi pemicu rangkaian peristiwa yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Presiden Sukarno, naiknya Jenderal Soeharto, dan pembantaian massal yang ditujukan kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak awal, rezim Orde Baru membangun narasi resmi yang menempatkan PKI sebagai dalang tunggal peristiwa tersebut. Narasi ini dibakukan melalui karya sejarawan militer Nugroho Notosusanto bersama Ismail Saleh dalam Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (1968), yang kemudian diperkuat lewat Buku Putih Sekretariat Negara serta diajarkan secara seragam di sekolah-sekolah selama lebih dari tiga dekade.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa historiografi G30S sejak peristiwa itu sendiri telah menjadi medan pertarungan politik. Cornell Paper yang disusun Benedict Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Bunnell pada 1966 telah menantang versi resmi dengan menyebut G30S sebagai persoalan internal Angkatan Darat, bukan rencana besar PKI. Sebaliknya, narasi tandingan yang didukung oleh kalangan militer dan, menurut sejumlah catatan, melibatkan Guy Pauker dari RAND Corporation, melahirkan versi resmi yang kemudian dilembagakan negara. Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, ruang bagi kajian revisionis terbuka lebar, ditandai oleh kemunculan kesaksian korban, diskusi publik, dan penelitian akademik baru yang berupaya melakukan apa yang oleh sejarawan Asvi Warman Adam disebut sebagai pelurusan sejarah.

Dalam konteks inilah karya John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia (2006), yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2008), menempati posisi penting. Roosa, sejarawan dari University of British Columbia, menyusun rekonstruksi peristiwa G30S berdasarkan sumber-sumber baru, terutama Dokumen Supardjo, sebuah catatan internal yang ditulis salah satu perwira yang terlibat langsung dalam gerakan tersebut. Karya ini sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung pada 2009, sebuah fakta yang menegaskan betapa sensitifnya persoalan historiografi G30S hingga sekarang.

Secara teoretis, kajian ini bertumpu pada gagasan bahwa historiografi tidak pernah netral; ia selalu merupakan hasil seleksi, interpretasi, dan kepentingan dari subjek yang menuliskannya. Sejarawan Katharine McGregor, dalam analisisnya tentang ideologi militer Orde Baru, menunjukkan bagaimana sejarah nasional diseragamkan melalui kurikulum, museum, dan film untuk membentuk ingatan kolektif yang menguntungkan kekuasaan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membedah secara kritis bagaimana narasi resmi dikonstruksi dan bagaimana karya akademik seperti milik Roosa berfungsi sebagai koreksi historiografis. Fokus penelitian ini adalah analisis komparatif antara narasi resmi Orde Baru dan rekonstruksi Roosa, dengan manfaat memberikan pemahaman yang lebih kritis dan berimbang mengenai salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri atas empat tahap: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber data dikumpulkan dari literatur primer dan sekunder, meliputi karya John Roosa Dalih Pembunuhan Massal dan versi

aslinya Pretext for Mass Murder, dokumen resmi Orde Baru seperti Tragedi Nasional karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, artikel jurnal ilmiah, ulasan buku akademik, serta tulisan sejarawan lain mengenai historiografi G30S dan PKI yang dipublikasikan di jurnal dan media daring kredibel.

Tahap kritik sumber dilakukan dengan menelaah kredibilitas dan konteks penerbitan masing-masing sumber, membedakan antara dokumen yang diproduksi sebagai instrumen propaganda negara dan kajian akademik yang menggunakan metodologi sejarah kritis dan verifikasi silang sumber. Tahap interpretasi dilakukan dengan membandingkan struktur naratif, bukti yang digunakan, serta kepentingan ideologis di balik kedua jenis sumber tersebut. Tahap akhir, historiografi, adalah penyusunan kembali temuan dalam bentuk narasi analitis yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Narasi Resmi Orde Baru

Narasi resmi tentang G30S dibangun sejak hari-hari pertama setelah peristiwa terjadi. Angkatan Darat, di bawah kendali Mayor Jenderal Soeharto, segera mengendalikan pemberitaan dan secara konsisten melekatkan label "G30S/PKI" pada peristiwa tersebut, sebuah penamaan yang berbeda dari sebutan para pelaku sendiri yang hanya menyebut gerakan mereka sebagai "Gerakan 30 September". Literatur akademik mencatat bahwa landasan tekstual dari narasi ini pertama kali disusun oleh Nugroho Notosusanto bersama Ismail Saleh melalui Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia, yang menempatkan PKI sebagai satu-satunya pelaku percobaan kudeta dan menjadi dasar bagi seluruh produk historiografi resmi berikutnya, termasuk Buku Putih Sekretariat Negara yang diterbitkan kemudian.

Narasi ini selanjutnya dilembagakan melalui sistem pendidikan nasional dan kebudayaan populer. Nugroho Notosusanto, yang juga menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun kurikulum sejarah dan menyunting Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI dengan menonjolkan peran PKI sebagai dalang sekaligus mengecilkan peran Sukarno dalam proses yang oleh para sejarawan disebut sebagai desukarnoisasi. Instrumen paling masif dari diseminasi narasi ini adalah film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C. Noer, yang ditonton wajib oleh pelajar Indonesia setiap tahun hingga 1997 dan menggambarkan tokoh-tokoh PKI sebagai sosok kejam dan keji. Dengan meminjam kerangka Katharine McGregor, mekanisme ini menunjukkan bagaimana sejarah diseragamkan menjadi alat ideologi militer untuk mengonsolidasikan legitimasi kekuasaan Orde Baru.

Rekonstruksi Kritis John Roosa

Karya Roosa berangkat dari ketidakpuasan atas minimnya kajian mendalam mengenai G30S, padahal dampaknya pada sejarah Indonesia sangat besar. Roosa menyusun ulang kronologi peristiwa pada hari-hari pertama Oktober 1965 tanpa bertumpu pada kesimpulan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebuah pendekatan metodologis yang ia bangun secara hati-hati dengan menelaah berbagai bukti baru maupun lama. Salah satu kontribusi terpenting Roosa adalah penggunaan Dokumen Supardjo, sebuah catatan evaluasi yang ditulis Brigadir Jenderal Supardjo, perwira yang terlibat langsung dalam G30S, yang menurut sejumlah pengamat jarang digunakan oleh penulis-penulis sebelumnya.

Berbeda dengan kebanyakan tulisan yang berusaha langsung menunjuk dalang G30S, baik PKI, Soeharto dan jajaran Angkatan Darat, Sukarno, maupun pihak asing, Roosa memilih menjelaskan secara rinci sejumlah keanehan dalam gerakan tersebut dan alasan kegagalannya berdasarkan kesaksian pelaku serta dokumen yang tersedia. Roosa juga menolak interpretasi sejumlah ahli Indonesia terkemuka, termasuk Benedict Anderson dan Harold Crouch yang menonjolkan peran dominan perwira militer, maupun hipotesis bahwa Sjam Kamaruzaman, kepala Biro Khusus PKI, sesungguhnya adalah agen ganda intelijen Angkatan Darat. Pendekatan semacam ini menunjukkan kehati-hatian metodologis yang kontras dengan kepastian tunggal yang ditawarkan narasi resmi Orde Baru.

Inti argumen Roosa adalah bahwa G30S, terlepas dari siapa pun aktor di baliknya, telah dimanfaatkan secara sengaja oleh Soeharto dan Angkatan Darat sebagai dalih untuk melancarkan operasi pembasmian terhadap PKI dan kelompok kiri secara luas. Peristiwa ini disalahtafsirkan secara sengaja dan dipelintir agar dapat membenarkan kekerasan negara, mulai dari penangkapan massal tanpa dakwaan, interogasi disertai penyiksaan, penahanan berkepanjangan tanpa proses pengadilan, hingga pembunuhan kilat. Diperkirakan operasi pembasmian ini menelan korban jiwa antara lima ratus ribu hingga satu juta orang anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia, sebuah angka yang menjadikan peristiwa 1965-1966 sebagai salah satu episode kekerasan massal terbesar di Asia pada abad kedua puluh.

Perbandingan Narasi: Legitimasi versus Bukti

Perbandingan antara historiografi resmi Orde Baru dan kajian Roosa memperlihatkan perbedaan mendasar dalam tujuan, metode, dan sikap terhadap bukti. Narasi resmi disusun sebagai proyek politik yang bertujuan melegitimasi kekuasaan baru sekaligus membenarkan kekerasan yang telah terjadi, sehingga cenderung menyederhanakan persoalan menjadi kesalahan tunggal PKI tanpa ruang bagi keraguan atau interpretasi alternatif. Sebaliknya, karya Roosa disusun dengan kerangka kerja layaknya investigasi yang menelusuri bukti secara bertahap, mengakui ketidakpastian, dan secara eksplisit menyatakan tidak bermaksud memberikan jawaban final atas pertanyaan siapa dalang sesungguhnya di balik G30S.

Perbedaan ini juga tampak dalam bagaimana masing-masing narasi memperlakukan pembunuhan massal itu sendiri. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa dokumen resmi seperti Tragedi Nasional sama sekali tidak menyinggung pembantaian massal warga sipil; istilah "tragedi nasional" yang digunakan justru merujuk pada terbunuhnya tujuh perwira Angkatan Darat, bukan kematian ratusan ribu warga sipil. Pembungkaman terhadap fakta pembantaian inilah yang oleh Roosa dipersoalkan sebagai inti persoalan historiografis: peristiwa G30S dijadikan dalih, sementara konsekuensi kekerasannya disembunyikan dari ingatan publik selama lebih dari tiga dekade.

Dilarangnya buku Dalih Pembunuhan Massal oleh Kejaksaan Agung pada 2009, meski kemudian dibatalkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan kejaksaan untuk melarang buku, menjadi bukti empiris bahwa kontestasi atas historiografi G30S belum sepenuhnya selesai bahkan satu dekade setelah reformasi. Fenomena ini sejalan dengan pengamatan Asvi Warman Adam bahwa historiografi G30S dapat dibagi menjadi tiga periode besar, yaitu periode pembentukan narasi resmi pada masa Orde Baru, periode pelurusan sejarah yang dimulai sejak 1998 oleh para korban dan akademisi, serta periode kontemporer yang ditandai pluralisme tafsir namun juga residu kontroversi politik yang terus berulang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa historiografi resmi Orde Baru mengenai PKI dan G30S bukanlah produk kajian sejarah yang objektif, melainkan konstruksi politik yang sengaja dirancang oleh Nugroho Notosusanto dan aparat negara untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto serta membenarkan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Narasi ini disebarluaskan secara sistematis melalui kurikulum sekolah, buku teks, dan film propaganda sehingga membentuk ingatan kolektif bangsa Indonesia selama lebih dari tiga dekade tanpa ruang bagi tafsir alternatif. Karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal, hadir sebagai koreksi historiografis penting dengan menawarkan rekonstruksi berbasis dokumen baru, terutama Dokumen Supardjo, serta sikap metodologis yang berhati-hati dan terbuka terhadap ketidakpastian, alih-alih menetapkan kesimpulan tunggal layaknya narasi resmi. Roosa berhasil menunjukkan bahwa terlepas dari kompleksitas siapa dalang sesungguhnya G30S, peristiwa tersebut telah dimanfaatkan secara sengaja sebagai dalih bagi operasi kekerasan negara berskala besar. Temuan ini menegaskan pentingnya kajian historiografi kritis dalam membongkar narasi-narasi yang dibangun oleh kekuasaan otoriter, sekaligus menjadi pengingat bahwa proses pelurusan sejarah masih relevan dilakukan hingga kini. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah lebih jauh resepsi karya Roosa di kalangan generasi muda Indonesia pascareformasi serta dampak kajian revisionis terhadap kebijakan pendidikan sejarah nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang atas masukan dan diskusi yang berharga selama penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. W. (2018). Historiografi Gerakan 30 September 1965 dalam Pandangan Asvi Warman Adam.

Anderson, B., McVey, R., & Bunnell, F. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Budiardjo, C. (2007). Book Review: Pretext for Mass Murder. Tapol. Diambil dari https://tapol.org/news/book-review-pretext-mass-murder

Kedai Pena. (2025). 'Korupsi' Sejarah di Indonesia, Dari Nugroho Notosusanto Hingga Fadli Zon. Diambil dari https://www.kedaipena.com/korupsi-sejarah-di-indonesia-dari-nugroho-notosusanto-hingga-fadli-zon/

Kompas.com. (2025). G30S 1965: Krisis Multidimensi dan Pentingnya Membaca Sejarah secara Kritis. Diambil dari https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/13464891/g30s-1965-krisis-multidimensi-dan-pentingnya-membaca-sejarah-secara-kritis

McGregor, K. (2007). History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past. Singapore: NUS Press.

Notosusanto, N., & Saleh, I. (1968). Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia. Jakarta: Intermasa.

Roosa, J. (2006). Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press.

Roosa, J. (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (H. Setiawan, Terj.). Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra.

Hussein, M. Z. (2012). Prof. John Roosa: Identitas Bangsa Indonesia Berubah Total Sesudah 1965. IndoPROGRESS. Diambil dari https://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/

Tirto.id. (2022). Nugroho Notosusanto dan Buku Putih Pengkhianatan PKI versi Orba. Diambil dari https://tirto.id/nugroho-notosusanto-dan-buku-putih-pengkhianatan-pki-versi-orba-cxxb

Historia.id. (2017). Lima Versi Pelaku Peristiwa G30S. Diambil dari https://www.historia.id/article/lima-versi-pelaku-peristiwa-g30s-dwv0n

Labuhanbatu.com. (2025). Telaah Kritis: Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan Dekonstruksi Historiografi Nasional. Diambil dari https://labuhanbatu.com/2025/09/30/telaah-kritis-peristiwa-gerakan-30-september-1965-g30s-dan-dekonstruksi-historiografi-nasional/